

**EVALUASI IMPLEMENTASI PENGADAAN OBAT BERDASARKAN SISTEM KATALOG ELEKTRONIK (E-CATALOGUE) DI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015**

**EVALUATION OF DRUG PROCUREMENT IMPLEMENTATION REGARDING ON ELECTRONIC CATALOGUE IN SINTANG 2015**

**Aida Hermiana<sup>1</sup>, Robiyanto<sup>1</sup>, Nurmainah<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Farmasi, Fakultas Kedokteran, Universitas Tanjungpura, Pontianak

Naskah diterima tanggal 21 September 2017

**ABSTRACT**

*The drug procurement regarding on Electronic Catalogue policy in Sintang had been running since 2013 but there were some issues related to that process. Hence, it was important to evaluate the implementation of this policy. This study aimed to evaluate the drug procurement implementation regarding on Electronic Catalogue in Sintang in 2015 concerning to the planning of drug needs, drug procurement and the realization of drug needs. The design of this study was a descriptive survey, the primary data was collected prospectively with an interview and the secondary data was collected retrospectively using the health public service's drug usage report and demand sheet in 2015. Informants were three health public service's drug managing officers and a drug procurement officer in Sintang. The result of this study shows that the drug needs planning and drug procurement process had been running well with 100% and 90% percentage. The drug and health supplies was not all fulfilled but its types was appropriated with what had been ordered. The realization of drug needs in Sintang in 2015 increased from the previous year with the smallest stock percentage was 66,67% while the percentage in 2014 was 36,76%.*

**Keywords** : *drug needs planning, drug needs realization, drug procurement, electronic catalogue, public health service*

**ABSTRAK**

Pengadaan obat berdasarkan Katalog Elektronik di Kabupaten Sintang telah berjalan sejak tahun 2013 namun memiliki beberapa permasalahan sehingga perlu dilakukan evaluasi mengenai implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi pengadaan obat berdasarkan Katalog Elektronik di Kabupaten Sintang tahun 2015 dimulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan hingga realisasi kebutuhan obat puskesmas. Desain penelitian berupa survey deskriptif dengan metode pengumpulan data primer dengan wawancara mendalam serta pengumpulan data sekunder melalui Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) puskesmas. Informan merupakan petugas pengelola obat di 3 puskesmas di Kabupaten Sintang serta Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan proses perencanaan dan pengadaan obat berdasarkan Katalog Elektronik telah berjalan baik dengan persentase 100% dan 90%. Tahun 2015 tidak semua jenis obat dan perbekalan terealisasi namun jenisnya sudah sesuai dengan yang telah dipesan oleh puskesmas. Realisasi kebutuhan obat di Kabupaten Sintang tahun 2015 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dengan persentase ketersediaan terkecil sebesar 66,67% sedangkan pada tahun 2014 sebesar 36,76%.

**Kata Kunci** : katalog elektronik, pengadaan obat, perencanaan kebutuhan obat, realisasi kebutuhan obat, puskesmas

## PENDAHULUAN

Obat-obatan merupakan komponen esensial dari suatu pelayanan kesehatan dan telah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat. Oleh karena vitalnya obat dalam pelayanan kesehatan, maka diperlukan pengelolaan obat yang benar, efisien dan efektif oleh petugas di Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Pengadaan obat-obatan termasuk dalam proses pengadaan barang/ jasa di instansi pemerintahan yang sebelumnya diadakan secara manual, namun pada awal tahun 2013 Kementerian Kesehatan mengeluarkan Surat Edaran Nomor KF/Menkes/337/VII/2013 tentang Pengadaan Obat Pemerintah Melalui Mekanisme *E-Purchasing* berdasarkan Katalog Elektronik (*E-Catalogue*).

Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang merupakan lembaga daerah yang berupaya mewujudkan peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Sintang. Sebagai lembaga daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang wajib menyediakan obat esensial untuk kebutuhan Puskesmas dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lainnya sesuai kebutuhan (Kemenkes RI, 2010). Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang telah melakukan pengadaan obat dengan berdasarkan Katalog Elektronik sejak tahun 2013.

Beberapa permasalahan muncul berkaitan dengan pengadaan obat berdasarkan Katalog Elektronik. Sebagai contoh, menurut Sarlin Djuna dkk, pada tahun 2012 hasil pencatatan dan pelaporan di Puskesmas Labakkang terjadi kekurangan obat serta obat yang tidak terealisasi pada tahun 2013. Pembahasan mengenai kelebihan maupun kelemahan mekanisme katalog elektronik di Kabupaten Sintang hanya dilakukan saat ada pertemuan antara pihak Puskesmas dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang yang diadakan satu kali dalam satu tahun. Berdasarkan uraian tersebut maka perlu dilakukan evaluasi mengenai implementasi pengadaan obat berdasarkan Katalog Elektronik di Kabupaten Sintang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi pengadaan obat berdasarkan Katalog Elektronik di Kabupaten Sintang tahun 2015 dimulai dari perencanaan kebutuhan di puskesmas, pengadaan serta realisasi kebutuhan obat di Kabupaten Sintang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian observasional dengan desain penelitian *survey* deskriptif dengan pendekatan kualitatif berupa penelitian evaluasi untuk melihat pengadaan obat berdasarkan *E-Catalogue* di Kabupaten Sintang pada tahun 2015. Aspek yang diteliti dalam penelitian dimulai dari proses

perencanaan di puskesmas, pengadaan oleh Dinas Kesehatan, serta cakupan realisasi kebutuhan obat terkait pengadaan obat berdasarkan sistem *E-Catalogue*.

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar pengumpulan data, pedoman wawancara dan *tape recorder*. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) Puskesmas Dara Juanti, Puskesmas Tempunak dan Puskesmas Tanjung Puri selama tahun 2015 serta data realisasi kebutuhan obat di Kabupaten Sintang tahun 2014 dan 2015. Puskesmas dipilih berdasarkan jumlah kunjungan tertinggi, kunjungan mendekati rata-rata dan kunjungan terendah pada tahun 2013. Jumlah kunjungan dianggap berbanding lurus dengan kebutuhan obat di puskesmas sehingga dapat dilihat efektivitas katalog elektronik untuk memenuhi kebutuhan obat yang tinggi, menengah dan rendah.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang serta puskesmas yang berada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang yang memiliki jumlah kunjungan tertinggi, terendah dan mendekati rata-rata. Sedangkan kriteria eksklusi dalam penelitian ini yaitu semua Bidang dan Seksi selain Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang serta puskesmas di luar wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang.

### Tahapan/Jalannya Penelitian

Peneliti memenuhi persyaratan administrasi terkait izin penelitian kemudian melakukan studi pendahuluan dan pengumpulan data berupa Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) Puskesmas Dara Juanti, Puskesmas Tempunak dan Puskesmas Tanjung Puri selama tahun 2015 serta data realisasi kebutuhan obat di Kabupaten Sintang tahun 2014 dan 2015. Wawancara diawali dengan perkenalan diri serta memberitahukan bentuk dan tujuan penelitian. Peneliti berfokus melakukan wawancara mendalam kepada petugas pengelola obat di tiap puskesmas kemudian dilanjutkan dengan Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang. Pemilihan waktu wawancara disesuaikan dengan waktu yang dimiliki oleh peneliti dan informan. Secara keseluruhan, proses wawancara berjalan lancar dimana informan sangat kooperatif serta mampu menjawab dengan jelas terkait pertanyaan yang diberikan oleh peneliti.

### Analisa Data Secara Deskriptif

Analisa data hasil wawancara dilakukan

secara deskriptif. Persentase efektivitas sistem katalog elektronik dihitung dengan membandingkan jumlah jawaban “Ya” yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap jumlah pertanyaan. Data disajikan dalam bentuk tabel yang memuat pertanyaan serta jawaban informan mengenai evaluasi dalam pengadaan obat berdasarkan Katalog Elektronik. Analisa data juga dilakukan dengan melihat LPLPO Puskesmas selama tahun 2015 untuk mengetahui ketersediaan data kebutuhan obat dan realisasi kebutuhan obat di Kabupaten Sintang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan kebutuhan obat merupakan salah satu tahapan dari kegiatan pengelolaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di puskesmas. Perencanaan merupakan kegiatan proses seleksi BMHP untuk menentukan jenis dan jumlah obat dalam rangka pemenuhan kebutuhan puskesmas. Tujuan perencanaan adalah untuk mendapatkan perkiraan jenis dan jumlah BMHP yang mendekati kebutuhan, meningkatkan penggunaan obat secara rasional dan meningkatkan efisiensi penggunaan obat

(Kemenkes RI, 2014). Perencanaan kebutuhan obat yang matang diperlukan agar tidak terjadi penumpukan stok obat (Bagus, 2015). Selain itu, perencanaan pengadaan obat yang kurang maksimal seperti ketidaktepatan dalam menentukan jenis dan jumlah obat juga dapat menyebabkan terjadinya kekosongan obat (Yulistiani, 2014).

Berdasarkan hasil wawancara pada tabel 1, proses perencanaan kebutuhan obat telah dilakukan oleh petugas yang berwenang. Masing-masing puskesmas memiliki petugas pengelola obat yaitu Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) atau Asisten Apoteker (AA) atas persetujuan Apoteker Penanggung Jawab (APJ) Puskesmas. Semua petugas pengelola obat di ketiga puskesmas mengetahui tentang sistem Katalog Elektronik namun secara teknis penggunaan sistem tersebut dilakukan oleh petugas pengadaan di Dinas Kesehatan. Terkait proses perencanaan, puskesmas memiliki petunjuk teknis berupa buku pedoman pengadaan obat, didukung material penunjang seperti laptop dan komputer.

Proses perencanaan kebutuhan obat di Puskesmas Dara Juanti, Puskesmas Tempunak,

**Tabel 1. Hasil Wawancara Terkait Perencanaan Kebutuhan Obat di Puskesmas Dara Juanti, Puskesmas Tempunak dan Puskesmas Tanjung Puri**

No	Pertanyaan	Jawaban					
		Dara Juanti		Tempunak		Tanjung Puri	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Apakah terdapat petugas pengelola obat di puskesmas?	v	-	v	-	v	-
2	Apakah petugas pengelola obat di puskesmas mengetahui tentang sistem pengadaan berdasarkan Katalog Elektronik?	v	-	v	-	v	-
3	Apakah tersedia petunjuk teknis serta material penunjang dalam proses perencanaan obat di puskesmas?	v	-	v	-	v	-
4	Apakah proses perencanaan kebutuhan obat di puskesmas dilakukan dengan memperhatikan pola penyakit, pola konsumsi obat periode sebelumnya, mutasi obat dan rencana pengembangan?	v	-	v	-	v	-
5	Apakah proses seleksi obat mengacu pada DOEN dan Formularium Nasional?	v	-	v	-	v	-
6	Apakah Puskesmas menyusun Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO)?	v	-	v	-	v	-

dan Puskesmas Tanjung Puri telah berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Perencanaan dilakukan secara berjenjang, dengan mempertimbangkan pola penyakit, pola konsumsi obat periode sebelumnya, data mutasi obat, dan rencana pengembangan. Perencanaan obat juga telah mengacu pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan Formularium Nasional (FORNAS). Pihak Dinas Kesehatan menyediakan kotak pesan yang dapat diakses oleh petugas pengelola obat puskesmas dimana kotak pesan tersebut memuat informasi daftar obat serta memudahkan puskesmas dalam memasukkan data laporan penggunaan dan daftar permintaan obat karena memuat daftar obat yang tersedia. Puskesmas selanjutnya membuat data pemakaian obat dengan menggunakan LPLPO (Kemenkes RI, 2014).

Puskesmas Dara Juanti, Puskesmas Tempunak, dan Puskesmas Tanjung Puri rutin membuat LPLPO setiap bulan yang selanjutnya diserahkan ke Bidang Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang. Selanjutnya petugas pengadaan dari Dinas

Kesehatan akan mengoreksi LPLPO puskesmas tersebut kemudian menyesuaikan permintaan dengan jumlah obat maupun perbekalan kesehatan yang dapat diberikan. Obat dan perbekalan kesehatan disalurkan ke puskesmas dengan cara diambil langsung oleh petugas dari puskesmas pada jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak.

Kelebihan dari sistem perencanaan yang diterapkan di puskesmas saat ini berdasarkan jawaban informan yaitu kemudahan proses memasukkan data serta akses informasi dengan adanya kotak pesan yang dapat diakses oleh pihak puskesmas. Perencanaan obat di puskesmas telah berjalan dengan baik menggunakan sistem katalog elektronik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta telah dilaksanakan dengan tepat dengan persentase sebesar 100%.

Pengadaan secara elektronik dilakukan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapannya bertujuan meningkatkan transparansi, meningkatkan persaingan yang sehat, serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan proses pengadaan barang/ jasa. Dinas

**Tabel 2. Hasil Wawancara Terkait Pengadaan Obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang**

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Apakah terdapat petugas pengadaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang?	v	-
2	Apakah petugas mengetahui tentang sistem pengadaan berdasarkan Katalog Elektronik?	v	-
3	Apakah tersedia petunjuk teknis dan material penunjang dalam proses pengadaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang berkaitan dengan Katalog Elektronik?	v	-
4	Apakah Dinas Kesehatan rutin menerima LPLPO dari puskesmas?	v	-
5	Apakah pihak Dinas Kesehatan melakukan kompilasi dan analisa terhadap kebutuhan obat Puskesmas?	v	-
6	Apakah petugas melakukan pengadaan obat menggunakan sistem Katalog Elektronik?	v	-
7	Apakah mekanisme yang dilakukan telah sesuai dengan PMK No.63 tahun 2014?	v	-
8	Apakah semua jenis obat dan perbekalan kesehatan lain yang akan diadakan tersedia seluruhnya dalam Katalog Elektronik?	v	-
9	Apakah petugas mengetahui sistem pengadaan secara manual?	v	-
10	Apakah proses pengadaan obat berdasarkan Katalog Elektronik secara keseluruhan lebih baik dibandingkan sistem sebelumnya?	-	v

Kesehatan Kabupaten Sintang telah menerapkan sistem ini sejak tahun 2013.

Berdasarkan hasil wawancara pada tabel 2, terdapat petugas pengadaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang antara lain terdiri atas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di mana masing-masing petugas memiliki pengetahuan terkait sistem Katalog Elektronik. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pengadaan obat di satuan kerja bidang kesehatan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Petugas pengadaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang memiliki petunjuk teknis berupa Peraturan Menteri Kesehatan, selain itu juga dilakukan pembelajaran secara manual dan sebelumnya telah diberikan pelatihan oleh pihak Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Material penunjang yang digunakan adalah berupa laptop dan komputer.

Proses pengadaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang diawali dengan secara rutin menerima LPLPO dari puskesmas di wilayah kerjanya. Selanjutnya petugas pengadaan melakukan kompilasi dan analisa terhadap kebutuhan obat puskesmas sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Setelah LPLPO puskesmas dikoreksi, maka petugas pengadaan akan melakukan pengadaan obat secara elektronik.

Secara keseluruhan, mekanisme pengadaan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik. Petuga daring ke dalam sistem setelah sebelumnya menyusun Rencana Kebutuhan Obat (RKO), kemudian membuat paket pembelian dan melihat pihak yang menjadi penyedia obat. Apabila telah disetujui maka penyedia akan menyampaikan permintaan kepada distributor untuk menyalurkan obat dan perbekalan kesehatan yang diminta pihak Dinas Kesehatan. Pengiriman obat dan perbekalan kesehatan dilakukan setelah dibuat kontrak antara pihak Dinas Kesehatan dengan distributor. Panitia penerima barang akan memberitahukan kepada penyimpan barang apabila obat dan perbekalan kesehatan telah sampai di Dinas Kesehatan. Obat dan perbekalan kesehatan yang diterima disimpan di gudang farmasi. Pemeriksaan dan pengujian dilakukan terhadap pesanan yang diterima meliputi jenis barang, jumlah barang, kesesuaian spesifikasi barang, serta masa kadaluarsa barang. Pembayaran dilakukan setelah obat dan perbekalan kesehatan diterima di Dinas Kesehatan,

disesuaikan dengan paket pesanan dan dokumen kontrak. Pembiayaan dalam proses pengadaan dengan Katalog Elektronik bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Jenis obat dan perbekalan kesehatan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang tahun 2015 seluruhnya terdaftar dalam sistem Katalog Elektronik namun ketersediaannya tergantung pada pihak penyedia/ industri farmasi. Apabila stok Katalog Elektronik kosong maka pengadaan dilakukan dengan sistem lelang dengan harga yang sama dengan harga yang ditetapkan dalam Katalog Elektronik.

Selama penerapannya di Kabupaten Sintang, pengadaan menggunakan sistem Katalog Elektronik memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya antara lain lebih mempermudah karena menggunakan sistem daring sehingga petugas pengadaan tidak perlu membuat perkiraan harga sendiri. Kelemahannya antara lain lambatnya respon penyedia, alasannya karena pemberitahuan pemesanan tidak muncul dalam sistem sehingga petugas pengadaan harus mengunduh ulang pemesanan. Selain itu, terkadang terjadi komunikasi yang kurang baik antara penyedia dengan pihak distributor. Ketika barang akan dikirim oleh penyedia ke Dinas Kesehatan, biasanya akan muncul pemberitahuan di kolom notifikasi tentang status pesanan. Pengiriman seharusnya dilakukan ketika kontrak dengan distributor telah siap namun biasanya penyedia telah terlebih dahulu melakukan pengiriman tanpa memberitahu distributor sementara dokumen kontraknya belum siap. Hal ini terkadang membuat petugas pengadaan harus menelepon distributor berkali-kali untuk menanyakan status pemesanan. Kelemahan lainnya yaitu dari segi ketersediaan obat di mana penyedia tidak dapat memastikan ketersediaan obat sehingga kebutuhan obat publik tidak terpenuhi maksimal. Terkait ketersediaan obat, pemerintah pusat sebaiknya lebih selektif dalam memilih penyedia sehingga dapat memenuhi seluruh kebutuhan yang mencakup skala nasional.

Berdasarkan jawaban yang diberikan informan pada tabel 2, dapat disimpulkan bahwa pengadaan obat menggunakan sistem Katalog Elektronik di Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang telah berjalan dengan baik dengan persentase 90%. Namun, proses ini dianggap tidak lebih baik dibandingkan sistem sebelumnya dikarenakan masih terdapat beberapa kelemahan seperti yang telah disebutkan oleh petugas pengadaan di Dinas Kesehatan antara lain dari segi pengiriman dan ketersediaan barang.

Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota wajib

menyediakan obat esensial dengan nama generik untuk kebutuhan puskesmas dan Unit Pelaksana Teknis lainnya sesuai kebutuhan (Kemenkes RI, 2010). Realisasi kebutuhan obat menjadi faktor yang penting dalam ketersediaan obat baik di Dinas Kesehatan maupun di puskesmas. Hasil wawancara terkait realisasi kebutuhan obat di Puskesmas Dara Juanti, Puskesmas Tempunak, dan Puskesmas Tanjung Puri pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 3.

Hasil wawancara pada tabel 3 menunjukkan bahwa tidak semua obat dan perbekalan kesehatan yang diminta pihak puskesmas selama tahun 2015 dapat direalisasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang. Hal ini dapat dilihat pada LPLPO puskesmas pada tahun 2013. Walaupun demikian, jenis obat dan perbekalan kesehatan yang dipesan sudah sesuai dengan apa yang telah dipesan oleh puskesmas seperti yang tercantum dalam nota pemesanan dan nota barang yang dikirimkan ke Dinas Kesehatan. Terkait kekosongan atau kekurangan stok obat, pihak Dinas Kesehatan sebaiknya segera memaksimalkan peran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat agar dapat menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan menggunakan stok provinsi.

Cakupan realisasi kebutuhan obat pada tahun 2015 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2015, persentase

ketersediaan terkecil sebesar 66,67% (PemKab Sintang, 2016) sedangkan pada tahun 2014 persentase ketersediaan terkecil adalah sebesar 36,76% (PemKab Sintang, 2015). Ketersediaan obat di Dinas Kesehatan sendiri mengalami peningkatan sebesar 29,91% dibandingkan tahun sebelumnya.

### KESIMPULAN

Proses perencanaan dan pengadaan obat berdasarkan Katalog Elektronik telah berjalan baik dengan persentase 100% dan 90%. Angka persentase diperoleh dari perhitungan berapa pertanyaan yang dijawab dengan jawaban "Ya" (dapat dilihat pada tabel wawancara). Berdasarkan LPLPO puskesmas pada tahun 2013, jenis obat dan perbekalan belum sepenuhnya terealisasi namun jenisnya sudah sesuai dengan yang telah dipesan oleh puskesmas. Realisasi kebutuhan obat di Kabupaten Sintang tahun 2015 meningkat sebesar 29,91% dibandingkan tahun sebelumnya.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Robiyanto, M.PharmSc., Apt dan Dr. Nurmainah, MM., Apt yang telah banyak membantu menyelesaikan naskah ini serta segenap pihak yang telah membantu jalannya penelitian.

**Tabel 3. Hasil Wawancara Terkait Realisasi Kebutuhan Obat**

No	Pertanyaan	Jawaban							
		Dara Juanti		Tempunak		Tanjung Puri		Dinas Kesehatan	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Apakah semua jenis obat dan perbekalan kesehatan yang diminta pihak puskesmas terealisasikan?	-	v	-	v	v	-	-	v
2	Apakah jenis obat dan perbekalan kesehatan yang diterima sudah sesuai dengan apa yang telah dipesan oleh puskesmas?	v	-	v	-	v	-	v	-
3	Apakah persentase realisasi kebutuhan obat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya?	v	-	v	-	v	-	v	-

**DAFTAR PUSTAKA**

- Bagus, IWA. 2015. Evaluasi Implementasi Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) di Kota Denpasar tahun 2015. Skripsi. FK Udayana: Denpasar.
- PemKab Sintang. 2015. Profil Kesehatan Kabupaten Sintang Tahun 2014. Pemerintah Kabupaten Sintang. Sintang
- PemKab Sintang. 2016. Profil Kesehatan Kabupaten Sintang Tahun 2015. Pemerintah Kabupaten Sintang. Sintang.
- Kemenkes RI. 2010. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/068/2010 Tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah. Kemenkes RI: Jakarta.
- Kemenkes RI. 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Kemenkes RI: Jakarta.
- Yulistiani. 2014. Studi Perencanaan dan Penyimpanan Obat di Instalasi Farmasi RSUD Puhwato. Skripsi. Universitas Negeri Gorontalo: Gorontalo.